



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 1016 18 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Bupati Grobogan

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan:

1. Nomor: B/100.3.2/137/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
2. Nomor: B/100.3.2/136/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
3. Nomor: B/100.3.2/132/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Nomor: B/100.3.2/138/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Nomor: B/100.3.2/145/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
6. Nomor: B/100.3/321/HUKUM/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;
7. Nomor: B/100.3.2/142/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;
8. Nomor: B/100.3.2/143/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pengelolaan Piutang Daerah;
telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr.Heni Susila Wardoyo, SH.MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.